



EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN I

Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Datar



Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar
Sumatera Barat



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Melalui Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya.

Program dan kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Akhirnya melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih.

Batusangkar, April 2025
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH DATAR



Drs. YUHARDI
NIP. 19650909 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I	
2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD Triwulan I	9
2.2 Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana	9
BAB III FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA	
3.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	15
3.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	15
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	17
4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar merupakan SKPD yang melaksanakan urusan penunjang, yaitu sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, sehingga dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatannya tidak secara langsung melibatkan masyarakat.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja ini merupakan bentuk untuk mengetahui sejauh mana Renstra telah dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Evaluasi dilaksanakan secara triwulan dan laporan ini merupakan *laporan triwulan I* pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga terjadi perubahan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya rancangan perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 adalah :

1. Menjadi acuan/dasar bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis

guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar.

2. Menyediakan dokumen resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam rangka penyusunan perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.
3. Agar seluruh aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja antara lain sebagai berikut :

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen rancangan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan, serta
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD
Triwulan I

2.2 Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja (tambahkan
tabel evaluasi renja)

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

- 3.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
- 3.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 rekomendasi Tindak Lanjut

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN I

2.1 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA OPD TRIWULAN I

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja Triwulan I	
			Target 2025	Realisasi
1.	Meningkatnya Layanan Administrasi	- Nilai Akuntabilitas Sekretariat DPRD	BB	B
2.	Meningkatnya Fasilitas Kedewanan	- Jumlah aspirasi masyarakat yang dapat diakomodasi DPRD dalam 1 Tahun	10 Kali	-

2.2 REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN DAN ANGGARAN RENCANA KERJA

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini terdiri atas 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.508.106.689,- dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.700.149.866,- atau 20% Pada pelaksanaan program ini, realisasi dari indikator kinerja keluaran (output) kegiatan masih rendah, diakibatkan oleh adanya perubahan sistem pembayaran dan pembaruan di aplikasi perpajakan. Dapat dilihat setiap sub kegiatan sebagai berikut :

No	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Nilai	%	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.046.456.298	4.483.225.430	21,3	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163.207.500	24.236.900	14,85	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	151.407.500	14.095.900	9,31	20
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	11.800.000	10.141.000	85,94	91
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.081.719.356	643.719.795	20,89	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.059.919.356	638.024.795	20,85	25
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.800.000	5.695.000	48,26	50
1.2.3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	10.000.000	0	0	5
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	0	0	
1.3.1	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	10.000.000	0	0	10

1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	23.579.731	23,58	
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	23.579.731	23,58	25
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	990.000.000	87.635.500	8,85	0
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	0	0	10
1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	0	0	20
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	0	0	25
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	0	0	20
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	130.000.000	0	0	20
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	185.000.000	25.298.300	13,67	30
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	62.337.200	15,58	25
1.5.8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	50.000.000	0	0	20
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.040.000	0	0	
1.6.1	Pengadaan Mebel	10.010.000	0	0	5
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	0	0	5
1.6.3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000	0	0	0
1.6.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000	0	0	0
1.6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000	0	0	0

1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.036.641.566	208.023.678	20,07	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	222.315.200	44.301.400	19,93	25
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.000.000	43.485.210	15,81	25
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	539.326.366	120.237.068	22,29	25
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.622.872.535	248.909.564	15,34	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	254.224.020	9.413.320	3,7	15
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	419.771.324	44.975.700	10,71	20
1.8.3	Pemeliharaan Mebel	15.000.000	0	0	0
1.8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.164.400	0	0	0
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainn	903.712.791	194.520.544	21,52	25
1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13.311.975.341	3.198.404.610	24,03	
1.9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12.659.475.341	3.198.404.610	25,26	30
1.9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	565.000.000	0	0	5
1.9.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	87.500.000	0	0	5
1.10	Layanan Administrasi DPRD	700.000.000	48.715.652	6,96	
1.10.1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	415.000.000	34.054.400	8,21	20
1.10.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	285.000.000	14.661.252	5,14	20

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini terdiri atas 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.523.619.000,- dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.665.019.896,- atau 15,3%. Pada pelaksanaan program ini, realisasi dari indikator kinerja keluaran (output) kegiatan masih rendah, diakibatkan oleh perubahan sistem pembayaran dan pembaruan di aplikasi perpajakan. Dapat dilihat dari uraian sub kegiatan sebagai berikut :

No	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Nilai	%	%
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18.148.619.000	3.172.675.010	17,48	
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.193.990.000	0	0	
2.1.1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.193.990.000	0	0	15
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	3.166.247.200	0	0	
2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	859.856.300	0	0	0
2.2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	612.528.900	0	0	0
2.2.3	Pembahasan APBD	256.116.300	0	0	0
2.2.4	Pembahasan APBD Perubahan	766.478.200	0	0	0
2.2.5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	671.267.500	0	0	10
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.511.282.800	0	0	
2.3.1	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.511.282.800	0	0	10
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.374.500.600	464.132.976	10,61	
2.4.1	Pendalaman Tugas DPRD	3.244.115.000	386.828.796	11,92	20
2.4.2	Publikasi dan Dokumentasi	779.835.600	29.139.180	3,74	20

	Dewan				
2.4.3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	290.550.000	48.000.000	16,52	20
2.4.4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	60.000.000	165.000	0,28	10
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.383.303.800	988.502.254	29,22	
2.5.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.700.000.000	541.966.904	31,88	40
2.5.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	70.164.400	12.082.200	17,22	25
2.5.3	Pelaksanaan Reses	1.613.139.400	434.453.150	26,93	30
2.6	Fasilitasi Tugas DPRD	4.519.294.600	1.720.039.780	38,06	
2.6.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.519.294.600	1.720.039.780	38,06	45

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

3.1 FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA

Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar yang di implementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threath*).

3.2 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian pelayanan, tentu masih dijumpai adanya kendala, tantangan ataupun hambatan. Terutama mengingat DPRD adalah unsur lembaga penyelenggara pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan

kebijakan daerah tentu harus mempunyai banyak referensi dan informasi yang cukup luas. Untuk memperlancar serta mempermudah pengambilan keputusan diperlukan data dan informasi yang *up to date*, *valid* dan mudah untuk mengaksesnya setiap saat dibutuhkan. Maka tantangan pelayanan kedepan terhadap dukungan kelancaran terhadap fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan DPRD, harus disiapkan Sumber Daya Manusia yang memadai, mempunyai kompetensi dalam bidang informasi dan teknologi serta pengembangan fasilitas transformasi teknologi informasi.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Melalui evaluasi Rencana Kerja Triwulan I TA 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar, diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya.

Program dan kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal yang penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang diemban oleh Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Sekretariat DPRD.

4.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala, oleh karena itu perlu diantisipasi sejak dini upaya-upaya perbaikan dan penyesuaiannya melalui evaluasi secara berkala setiap bulan secara intens dan konsisten dan berkoordinasi antar Bagian dan Sekretaris DPRD dan Pimpinan DPRD Kabupaten tanah Datar selaku pihak yang dilayani dan yang melayaninya.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan

senantiasa berprinsip pada azas efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu berpedoman pada rencana yang sudah tersusun dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Akhirnya melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I tahun 2025 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya

Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih.

Batusangkar, April 2025
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH DATAR



Drs. YUHARDI
NIP. 19650909 199203 1 007

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
 TRIWULAN I
 TAHUN 2025

No	Sasaran	Nomor Rekening	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome/ Kegiatan/Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Peranggung Jawab	KET		
					Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Fisik (%)				Keu (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			Fisik (%)	Keu (%)
1	2	3	3	4	5		6		7		8		12		13-9/12		14-12/100%		15			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik (%)	Keu (%)				
1	Meningkatkan layanan administrasi	4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN			37,451,308,712		47,008,428,208		41,031,725,689		7,365,169,762		4,287,018,475		37,257,260,086	32.0	192.6				
		4 02 01 2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			12,456,042,874		25,036,779,123		23,508,105,689		4,700,149,856		1,621,998,580		12,620,591,705	17.4	102.6				
						112,685,500		136,113,300		183,207,500		27,641,200		27,941,200		163,954,500	42.5	125.0	SETWAN			
		4 02 01 2.01	D1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Gaji THL 1 org Jumlah Administrasi Keuangan yang dilakukan Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	14 bulan 1500 dok 5 dok	95,891,100	1500 dok 5 dok	129,294,300	5 dok 5 dok	171,407,500	5 dok	18,024,600	5 dok	18,024,600	5 dok	147,318,900	15	154	SETWAN			
		4 02 01 2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang di hasilkan	3 dok	16,984,400	3 dok	6,819,000	3 dok	11,800,000	3 dok	9,916,600	3 dok	9,916,600	3 dok	16,635,600	70	98	SETWAN			
		4 02 01 2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			2,662,880,500		2,671,579,045		2,986,346,733		727,341,422		727,341,422		3,396,920,467	40	112.6	SETWAN			
		4 02 01 2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yg disediakan	14 bulan	2,544,880,500	14 bulan	2,664,760,045	23 orang/bulan	2,986,548,733	23 orang/bulan	717,582,822	23 orang/bulan	717,582,822	23 orang/bulan	3,382,342,867	15	133	SETWAN			
		4 02 01 2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang di hasilkan	1 dok	18,000,000	1 dok	6,819,000	2 Laporan	11,800,000	2 Laporan	9,750,800	2 Laporan	9,756,000	2 Laporan	16,577,000	65	92	SETWAN			
		4 02 01 2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			209,000,000		40,000,000		50,000,000		-		-		40,000,000	0	19	SETWAN			
		4 02 01 2.05	08 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	1 tahun	209,000,000	1 tahun	40,000,000	10 orang	50,000,000	-	-	-	-	10 orang	40,000,000	0	19	SETWAN			
		4 02 01 2.05	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			7,000,971,074		3,450,156,757		2,555,000,000		618,526,246		618,526,246		4,068,683,003	13.1	111.6	SETWAN			
		4 02 01 2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	25 jenis	25,996,400	25 jenis	25,000,000	25 paket	25,000,000	25 paket	6,717,000	25 paket	6,717,000	25 paket	33,717,000	15	130	SETWAN			
		4 02 01 2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	45,000,000	4 jenis	35,900,000	4 laporan	60,000,000	4 laporan	2,400,000	4 laporan	2,400,000	4 laporan	38,300,000	10	65	SETWAN			
		4 02 01 2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	30 jenis	30,992,400	30 jenis	66,489,740	30 paket	65,000,000	-	-	-	-	30 paket	66,489,740	15	215	SETWAN			
		4 02 01 2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	15 jenis	107,000,000	15 jenis	94,504,000	50 paket	185,000,000	50 paket	21,679,000	50 paket	21,679,000	50 paket	116,183,000	10	109	SETWAN			
		4 02 01 2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket bahan barang cetakan dan pengandaan	20 jenis	149,999,775	20 jenis	129,388,000	20 paket	185,000,000	20 paket	12,985,000	20 paket	12,985,000	20 paket	142,373,000	10	95	SETWAN			
		4 02 01 2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan yang di sediakan	10 media	130,000,000	10 media	124,200,000	10 dokumen	130,000,000	10 dokumen	19,650,000	10 dokumen	19,650,000	10 dokumen	143,850,000	10	111	SETWAN			
		4 02 01 2.06	06 Fasilitas Kurjungan Tamu	Gaji THL 3 org Jumlah Jenis tamu yang difasilitasi selama 1 tahun	42 bulan 1 tahun	269,598,900	42 bulan 1 tahun	218,078,880	12 laporan	285,000,000	12 laporan	43,039,850	12 laporan	43,039,850	12 laporan	261,118,730	15	97	SETWAN			
		4 02 01 2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis rapat yang terselenggara	1 tahun	6,242,393,599	1 tahun	2,756,596,137	1 laporan	1,600,000,000	1 laporan	510,055,396	1 laporan	510,055,396	1 laporan	3,286,851,533	20	52	SETWAN			
		4 02 01 2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMDA			372,500,000		2,159,800,000		198,750,000		-		-		2,159,800,000	10.0	84.6	SETWAN			
		4 02 01 2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	2 jenis	22,500,000	2 jenis	-	1 Paket	63,500,000	-	-	-	-	1 Paket	0	10	-	SETWAN			
		4 02 01 2.07	02 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas jabatan				1 unit	1,990,000,000	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1,990,000,000	-	-	SETWAN			
		4 02 01 2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional				6 unit	-	6 unit	-	-	-	-	6 unit	-	-	-	SETWAN			
		4 02 01 2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan mesin yang diadakan	2 set, 1 set, 1 unit	100,000,000	2 set, 1 set, 1 unit	169,200,000	1 Paket	115,250,000	-	-	-	-	1 Paket	169,200,000	10	169	SETWAN			
		4 02 01 2.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perencanaan dan pengadaan gedung kantor				1 paket	-	1 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	SETWAN			
		4 02 01 2.07	09 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor	12 bulan	250,000,000	12 bulan	-	12 bulan	-	-	-	-	-	12 bulan	-	-	-	SETWAN			
		4 02 01 2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN			

No	Sasaran	Monor Rekening	Usuan/Bidang Usuan Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output/ Kegiatan (Output)	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2026 (akhir periode rencana perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah Tahun Laku (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun Bejalan yang dievaluasi (Tahun 2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana yg dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana s/d Tahun 2025 (%)	Peringkat Daerah Penanggung Jawab	KET
		4 02 01 2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		764,646,000	883,807,454	1,073,176,277	161,060,833	161,060,833	1,044,748,287	15	141.0	SETWAN
		4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Gaji TH.L 6 org Jumlah laporan penggunaan perangkat, materi dan benda pos	112 bulan 1500 Materai 193,000,000	112 bulan 1500 Materai 254,181,200	12 laporan	277,479,600	12 laporan 53,436,600	12 laporan 307,617,800	15	159	SETWAN
		4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan tagihan rek listrik, air, telepon serta TV berlangganan	12 bulan 209,496,000	4 tagihan 240,004,564	12 laporan	275,000,000	12 laporan 57,870,936	12 laporan 57,870,936	15	142	SETWAN
		4 02 01 2.09 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa yang dilayani Tenaga kebersihan	23 jenis 12 bulan 362,150,000	23 jenis 12 bulan 389,501,650	12 laporan	520,896,677	12 laporan 49,753,297	12 laporan 439,254,967	15	121	SETWAN
		4 02 01 2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMDA		1,433,169,800	1,657,255,969	2,784,643,199	87,228,879	87,228,879	1,744,484,848	13	86.9	SETWAN
		4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Heorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis mobil jabatan yang dipelihara	3 unit 488,796,000	3 unit 292,092,376	3 unit	1,004,224,020	3 unit 5,535,250	3 unit 5,535,250	15	60	SETWAN
		4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Operasional atau Lapangan	Gaji TH.L 7 org Jumlah jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara Jumlah jenis kendaraan dinas yang dibayarkan pajak	98 bulan 14 unit 599,903,000	98 bulan 14 unit 775,213,600	14 unit	1,104,706,308	14 unit 40,181,300	14 unit 40,181,300	15	136	SETWAN
		4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang di pelihara	5 unit 20,000,000	5 unit 1,360,000	5 unit	35,000,000	-	5 unit 1,390,000	10	7	SETWAN
		4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	10 unit 65,000,000	10 unit 59,986,793	10 unit	65,000,000	10 unit 5,520,000	10 unit 65,506,793	10	101	SETWAN
		4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan rumah dinas yg di pelihara	1 unit 250,000,000	1 unit 528,573,000	2 unit	573,712,791	2 unit 35,962,329	2 unit 594,555,329	15	131	SETWAN
		4 02 01 2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD		13,162,400,312	13,138,793,478	12,969,980,980	2,977,766,440	2,977,766,440	16,116,561,918	8.3	107.4	SETWAN
		4 02 01 2.15 01	Penyenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tertaksananya pembayaran gaji pimpinan dan anggota DPRD	14 bulan 12,563,850,312	14 bulan 12,388,233,478	35 orang/bulan	12,337,480,983	35 orang/bulan 2,977,768,440	35 orang/bulan 15,366,001,918	15	122	SETWAN
		4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas yang di sediakan	4 jenis 541,050,000	4 jenis 686,700,000	4 paket	565,000,000	-	4 paket 686,700,000	10	127	SETWAN
		4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah jenis jaminan kesehatan yang di selenggarakan	1 paket 87,500,000	1 paket 63,860,000	35 orang	87,500,000	-	35 orang 63,860,000	0	73	SETWAN
		4 02 01 2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD		758,404,720	899,393,120	675,000,000	100,382,646	100,382,646	999,775,986	15	134.1	SETWAN
		4 02 01 2.16 02	Penyenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	jenis standar tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD	1 dok 50,000,000	1 dok -	1 dok	-	1 dok -	1 dok -	-	-	SETWAN
		4 02 01 2.16 03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Gaji TH.L 1 org Jenis rapat AKD dan rapat paripurna yg di laksanakan	14 bulan 100 kali 459,404,720	14 bulan 100 kali 654,962,450	12 laporan	415,000,000	12 laporan 68,984,500	12 laporan 68,984,500	15	158	SETWAN
		4 02 01 2.15 04	Penyediaan Kebutuhan rumah Tangga DPRD	tersedianya kebutuhan rumah tangga pimp	14 bulan 250,000,000	14 bulan 244,410,670	12 laporan	260,000,000	12 laporan 31,388,346	12 laporan 31,388,346	15	110	SETWAN
2	Meningkatkan fasilitas kedewanan	4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		24,995,265,838	21,971,649,085	17,523,619,000	2,665,019,896	2,665,019,896	24,636,668,981	14.6	90.1	
		4 02 02 2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD		3,663,794,000	584,106,600	1,400,000,000	-	-	584,106,600	15	16	
		4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah perda yang dihasilkan	6 perda 3,663,794,000	6 perda 584,106,600	6 dokumen	1,400,000,000	-	6 dokumen 584,106,600	15	16	SETWAN
		4 02 02 2.02	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN		3,040,614,900	1,502,000,800	2,414,484,500	-	-	1,502,000,800	0	27.6	SETWAN
		4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1 kali 680,480,700	1 kali 715,906,200	1 dokumen	522,300,000	1 dokumen -	1 dokumen 715,906,200	0	104	SETWAN
		4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	terlaksananya pembahasan KUA dan perubahan PPAS	1 kali 680,480,500	1 kali 21,719,100	1 dokumen	522,300,000	1 dokumen -	1 dokumen 21,719,100	0	3	SETWAN
		4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	terlaksananya pembahasan APBD	1 kali 465,788,950	1 kali 123,936,500	1 dokumen	400,000,000	1 dokumen -	1 dokumen 123,936,500	0	27	SETWAN
		4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	terlaksananya pembahasan APBD perubahan	1 kali 465,788,850	1 kali 16,625,000	1 dokumen	400,000,000	1 dokumen -	1 dokumen 16,625,000	0	4	SETWAN
		4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 perda 758,965,900	1 perda 623,904,000	1 dokumen	569,864,500	1 dokumen -	1 dokumen 623,904,000	0	82	SETWAN
		4 02 02 2.03	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		1,000,000,000	1,281,094,000	1,183,121,200	527,645,834	527,645,834	1,808,729,834	30	180.9	SETWAN
		4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah pengawasan penggunaan anggaran	3 kali 1,000,000,000	3 kali 1,281,094,000	3 dokumen	1,183,121,200	3 dokumen 527,645,834	3 dokumen 527,645,834	30	181	SETWAN
		4 02 02 2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD		3,066,978,100	2,805,289,274	2,918,328,850	432,691,170	432,691,170	3,237,980,444	12.5	77.6	SETWAN
		4 02 02 2.04 02	Pendalaman Iugas DPRD	Jumlah bimtek DPRD yang di laksanakan	6 kali 2,038,089,575	6 kali 1,718,353,850	6 dokumen	1,632,943,250	6 dokumen 342,421,890	6 dokumen 342,421,890	10	101	SETWAN

No	Seseran	Nomor Rekening	Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcome/ Kegiatan/Output	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024 (Akhir periode renstra perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang direalisasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yg direalisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET	
		4 02 02 2.04	03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah jenis informasi pemerintah yang di publikasikan	200 kali	675,924,925	200 kali	814,977,974	12 dokumen	779,835,600	12 dokumen	40,205,600	12 dokumen	40,205,600	12 dokumen	655,183,054	15	67	SETWAN		
		4 02 02 2.04	05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi 8 org	96 bulan	288,000,000	96 bulan	265,050,000	8 orang	290,550,000	8 orang	48,430,000	8 orang	48,430,000	8 orang	313,480,000	15	109	SETWAN		
		4 02 02 2.04	06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah hearing dengan masyarakat	20 kali	64,903,600	20 kali	6,907,450	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	1,633,500	1 dokumen	1,633,500	1 dokumen	6,540,950	10	13	SETWAN		
		4 02 02 2.05	PENERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT				3,347,872,600		3,619,677,350		3,607,704,450		417,214,300		417,214,300		4,036,801,850	10	114.6	SETWAN	
		4 02 02 2.05	01 Kurjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kurjungan kerja dalam daerah yang di adakan	1 tahun	1,455,314,600	1 tahun	2,439,825,350	1 laporan	1,800,000,000	1 laporan	399,747,900	1 laporan	399,747,900	1 laporan	2,839,573,250	15	195	SETWAN		
		4 02 02 2.05	02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya penyusunan pokir DPRD	14 bulan	34,408,000	14 bulan	39,105,400	1 dokumen	45,000,000	1 dokumen	17,466,400	1 dokumen	17,466,400	1 dokumen	50,571,800	15	67	SETWAN		
		4 02 02 2.05	03 Pelaksanaan Reses	Terlaksananya RESES DPRD	3 kali	1,858,150,000	3 kali	1,140,746,600	3 dokumen	1,662,704,450	-	-	-	-	3 dokumen	1,140,746,600	0	61	SETWAN		
		4 02 02 2	2. FASILITASI TUGAS DPRD				10,876,106,238		12,179,401,061		6,100,000,000		1,287,468,592		1,287,468,592		13,466,869,653	20	124	SETWAN	
		4 02 02 2	08 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kunjuri, konsultasi pimpinan dan anggota DPRD	1 tahun	10,876,106,238	1 tahun	12,179,401,061	12 dokumen	6,100,000,000	3 dokumen	1,287,468,592	3 dokumen	1,287,468,592	12 dokumen	13,466,869,653	20	124	SETWAN		

BATUSANGKAR, April 2025

SEKRETARIS



Dr. YUHARDI

NP. 1965099 199203 1 007



EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II

Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Datar



Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar
Sumatera Barat



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan II Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Melalui Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya.

Program dan kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Akhirnya melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2025 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih.

Batusangkar, Juli 2025
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH DATAR



Drs. YUHARDI
NIP. 19650909 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1.Latar Belakang	4
1.2.Landasan Hukum	5
1.3.Maksud dan Tujuan	6
1.4.Sistematika Penulisan	7
BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH	
TRIWULAN I	
2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah	9
2.2 Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana	9
BAB III FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT	
PENCAPAIAN KINERJA	
3.1.Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	16
3.2.Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	16
3.3.Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD	
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	18
4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar merupakan SKPD yang melaksanakan urusan penunjang, yaitu sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, sehingga dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatannya tidak secara langsung melibatkan masyarakat.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja ini merupakan bentuk untuk mengetahui sejauh mana Renstra telah dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Evaluasi dilaksanakan secara triwulan dan laporan ini merupakan *laporan triwulan II* pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga terjadi perubahan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya rancangan perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 adalah :

1. Menjadi acuan/dasar bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar.
2. Menyediakan dokumen resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam rangka penyusunan perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.
3. Agar seluruh aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja antara lain sebagai berikut :

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen rancangan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan, serta
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD

Triwulan I

2.2 Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja (tambahkan tabel evaluasi renja)

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

3.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

3.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

4.1 Kesimpulan

4.2 rekomendasi Tindak Lanjut

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

2.1 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA OPD TRIWULAN II

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja Triwulan II	
			Target 2025	Realisasi
1.	Meningkatnya Layanan Administrasi	- Nilai Akuntabilitas Sekretariat DPRD	BB	B
2.	Meningkatnya Fasilitasi Kedewanan	- Jumlah aspirasi masyarakat yang dapat diakomodasi DPRD dalam 1 Tahun	10 Kali	-

2.2 REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN RENCANA KERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2025 memiliki anggaran sebesar Rp. 34.031.725.689 dan realisasinya sebesar Rp. 14.388.889.021 atau 42,3%, lebih lanjutnya dapat dilihat dari uraian berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini terdiri atas 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.008.106.689,- dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 9.796.862.102,- atau 42,6% Pada pelaksanaan program ini, realisasi dari indikator kinerja keluaran (output) kegiatan masih rendah, diakibatkan oleh adanya perubahan sistem pembayaran dan pembaruan di aplikasi perpajakan. Dapat dilihat setiap sub kegiatan sebagai berikut :

A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% Keu	% Fisik
I.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Rp. 183.207.500</i>	<i>Rp. 76.021.500</i>	<i>41,5</i>	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 171.407.500	Rp. 64.228.300	37,5	50
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 11.800.000	Rp. 11.793.200	99,9	100
II.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Rp. 2.998.348.733</i>	<i>Rp. 1.409.462.148</i>	<i>47,1</i>	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.986.548.733	Rp. 1.397.667.948	47	50
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 11.800.000	Rp. 11.794.200	99,9	100
III.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Rp. 50.000.000</i>	<i>Rp. 0</i>	<i>0</i>	

1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Rp. 50.000.000	Rp. 0	0	0
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.055.000.000	Rp. 970.748.776	47,3	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 25.000.000	Rp. 10.467.000	42	50
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 60.000.000	Rp. 16.600.000	28	50
3.	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Rp. 65.000.000	Rp. 26.457.000	41	50
4.	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Rp. 195.000.000	Rp. 44.776.000	23	50
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 195.000.000	Rp. 26.205.000	31,1	50
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 130.000.000	Rp. 40.350.000	31,1	50
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 285.000.000	Rp. 87.876.650	31	50
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.100.000.000	Rp. 718.017.126	65,3	70
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 198.750.000	Rp. 60.861.300	31	
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 0	Rp. 0	0	
2.	Pengadaan Mebel	Rp. 83.500.000	Rp. 0	0	40

3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 115.250.000	Rp. 60.861.300	53	60
4.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0	0	
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0	0	
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0	0	
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.073.176.277	Rp. 461.751.145	43,1	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 277.479.600	Rp. 116.074.000	42	50
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 275.000.000	Rp. 117.446.225	43	50
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 520.696.677	Rp. 70.717.197	13,6	50
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.784.643.199	Rp. 453.062.665	16,3	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 1.004.224.020	Rp. 73.020.500	7,3	50

2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Operasional	Rp. 1.106.706.388	Rp. 145.408.500	13,2	50
3.	Pemeliharaan Mebel	Rp. 35.000.000	Rp. 0	0	45
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 65.000.000	Rp. 24.810.000	38,2	45
5.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 573.712.791	Rp. 209.823.665	36,6	50
VII.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp. 12.989.980.980	Rp. 6.176.036.880	47,6	
1.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp. 12.337.480.980	Rp. 6.176.036.880	50,1	60
2.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp. 565.000.000	Rp. 0	0	30
3.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp. 87.500.000	Rp. 0	0	15
IX.	Layanan Administrasi DPRD	Rp. 675.000.000	Rp. 188.917.688	28	
1.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp. 415.000.000	Rp. 114.051.800	35	50
2.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rp. 260.000.000	Rp. 74.865.888	29	50

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini terdiri atas 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 11.023.619.000,- dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.592.026.919,- atau 41,7%. Pada pelaksanaan program ini, realisasi dari indikator kinerja keluaran (output) kegiatan masih rendah, diakibatkan oleh perubahan sistem pembayaran dan pembaruan di aplikasi perpajakan. Dapat dilihat dari uraian sub kegiatan sebagai berikut :

B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% Keu	% Fisik
I.	<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>	<i>Rp. 652.375.000</i>	<i>Rp. 0</i>	<i>0</i>	
1.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 652.375.000	Rp. 0	0	30
II.	<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>	<i>Rp. 1.216.684.600</i>	<i>Rp. 0</i>	<i>0</i>	
1.	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp. 346.722.900	Rp. 0	0	0
2.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 346.722.900	Rp. 0	0	0
3.	Pembahasan APBD	Rp. 41.000.000	Rp. 0	0	0
4.	Pembahasan APBD Perubahan	Rp. 177.552.900	Rp. 0	0	0
5.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp. 304.685.900	Rp. 0	0	0
III.	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<i>Rp. 790.294.934</i>	<i>Rp. 531.597.434</i>	<i>67,3</i>	
1.	Pengawasan	Rp. 790.294.934	Rp. 531.597.434	67,3	70

	Penggunaan Anggaran				
IV.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp. 2.855.328.850	Rp. 1.008.632.773	35,4	
1.	Pendalaman Tugas DPRD	Rp. 1.769.943.250	Rp. 786.496.422	44,5	50
2.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp. 779.835.600	Rp. 95.830.151	12,3	50
3.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp. 290.550.000	Rp. 120.430.000	41,5	50
4.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp. 15.000.000	5.876.200	39,2	45
V.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp. 2.562.704.450	Rp. 951.511.200	37,2	
1.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp. 905.000.000	Rp. 574.887.150	63,6	70
2.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp. 45.000.000	Rp. 23.507.500	52,3	60
3.	Pelaksanaan Reses	Rp. 1.612.704.450	Rp. 353.116.550	22	50
VI.	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp. 2.946.231.166	Rp. 2.100.285.512	71,3	
1.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp. 2.946.231.166	Rp. 2.100.285.512	71,3	80

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

3.1 FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA

Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar yang di implementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threath*).

3.2 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian pelayanan, tentu masih dijumpai adanya kendala, tantangan ataupun hambatan. Terutama mengingat DPRD adalah unsur lembaga penyelenggara pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan

kebijakan daerah tentu harus mempunyai banyak referensi dan informasi yang cukup luas. Untuk memperlancar serta mempermudah pengambilan keputusan diperlukan data dan informasi yang *up to date*, *valid* dan mudah untuk mengaksesnya setiap saat dibutuhkan. Maka tantangan pelayanan kedepan terhadap dukungan kelancaran terhadap fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan DPRD, harus disiapkan Sumber Daya Manusia yang memadai, mempunyai kompetensi dalam bidang informasi dan teknologi serta pengembangan fasilitas transformasi teknologi informasi.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Melalui evaluasi Rencana Kerja Triwulan II TA 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar, diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya.

Program dan kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal yang penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang diemban oleh Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Sekretariat DPRD.

4.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala, oleh karena itu perlu diantisipasi sejak dini upaya-upaya perbaikan dan penyesuaiannya melalui evaluasi secara berkala setiap bulan secara intens dan konsisten dan berkoordinasi antar Bagian dan Sekretaris DPRD dan Pimpinan DPRD Kabupaten tanah Datar selaku pihak yang dilayani dan yang melayaninya.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada azas efisiensi dan efektivitas serta

akuntabilitasnya. Hal itu tentu berpedoman pada rencana yang sudah tersusun dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Akhirnya melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II tahun 2025 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya

Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih.

Batusangkar, Juli 2025
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH DATAR



Drs. YUHARDI
NIP. 19650909 199203 1 007

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
TRIWULAN II
TAHUN 2025

No	Sesuan	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcome/ Kegiatan/Output	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2026 (akhir periode rencana perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s/d Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5		6		7		8		9		10		11=6-10		12=11/5X100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Psisi (%)	Keu (%)				
					37,451,308,712		47,008,428,208		34,031,725,689		7,365,169,762		14,388,889,021		14,388,889,021		40,994,176,063	32.0	217.2				
					12,456,042,874		25,036,779,123		23,008,106,689		4,700,149,866		9,796,862,102		9,796,862,102		14,430,500,059	17.4	121.9				
					112,885,500		136,113,300		183,207,500		27,841,200		76,021,500		76,021,500		212,134,800	42.5	155.7	SETWAN			
1	Meningkatkan layanan administrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Gaji THL 1 org	14 bulan		14 bulan																	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan yang dilakukan	1500 dok	95,891,100	1500 dok	129,294,300	5 dok	171,407,500	5 dok	18,024,800	5 dok	64,228,300	5 dok	64,228,300	5 dok	193,522,800	15	202	SETWAN		
				Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	5 dok		5 dok																
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang di hasilkan	3 dok	16,994,400	3 dok	8,819,000	3 dok	11,800,000	3 dok	9,816,800	3 dok	11,793,200	3 dok	11,793,200	3 dok	18,812,200	70	110	SETWAN		
						2,562,880,500		2,671,579,045		2,998,348,733		727,341,422		1,409,462,148		1,409,462,148		4,081,041,193	4.0	131.5	SETWAN		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yg disediakan	14 bulan	2,544,880,500	14 bulan	2,664,760,045	23 orang/bulan	2,986,548,733	23 orang/bulan	717,582,822	23 orang/bulan	1,397,667,948	23 orang/bulan	1,397,667,948	23 orang/bulan	4,062,427,993	15	180	SETWAN		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang di hasilkan	1 dok	18,000,000	1 dok	8,819,000	2 Laporan	11,800,000	2 Laporan	9,758,800	2 Laporan	11,794,200	2 Laporan	11,794,200	2 Laporan	18,813,200	65	103	SETWAN		
						209,000,000		40,000,000		50,000,000		-		-		-		40,000,000	0	19	SETWAN		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian KORPRI yang disediakan	22 orang	-	22 orang	-	22 orang	-	22 orang	-	22 orang	-	22 orang	-	22 orang	-	-	-	-	SETWAN	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	1 tahun	209,000,000	1 tahun	40,000,000	10 orang	50,000,000	-	-	-	-	-	-	10 orang	40,000,000	0	19	SETWAN		
						7,000,971,074		3,450,156,757		2,055,000,000		618,526,246		970,748,776		970,748,776		4,420,905,533	13.1	135.3	SETWAN		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	25 jenis	25,996,400	25 jenis	25,000,000	25 paket	25,000,000	25 paket	8,717,000	25 paket	10,467,000	25 paket	10,467,000	25 paket	35,467,000	15	136	SETWAN		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	45,000,000	4 jenis	35,900,000	4 laporan	60,000,000	4 laporan	2,400,000	4 laporan	16,800,000	4 laporan	16,800,000	4 laporan	52,500,000	10	117	SETWAN		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	30 jenis	30,992,400	30 jenis	66,489,740	30 paket	65,000,000	-	-	-	26,457,000	-	26,457,000	30 paket	92,948,740	15	300	SETWAN		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	15 jenis	107,000,000	15 jenis	94,504,000	50 paket	195,000,000	50 paket	21,679,000	50 paket	44,776,000	50 paket	44,776,000	50 paket	139,280,000	10	130	SETWAN		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket bahan barang cetakan dan penggandaan	20 jenis	149,999,775	20 jenis	129,368,000	20 paket	195,000,000	20 paket	12,985,000	20 paket	26,205,000	20 paket	26,205,000	20 paket	155,593,000	10	104	SETWAN		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan yang di selesaikan	10 media	130,000,000	10 media	124,200,000	10 dokumen	130,000,000	10 dokumen	19,850,000	10 dokumen	40,350,000	10 dokumen	40,350,000	10 dokumen	164,550,000	10	127	SETWAN		
			Facilitasi Kunjungan Tamu	Gaji THL 3 org	42 bulan	266,588,900	42 bulan	218,078,880	12 laporan	285,000,000	12 laporan	43,039,850	12 laporan	87,876,650	12 laporan	87,876,650	12 laporan	305,955,530	15	113	SETWAN		
						1 tahun		1 tahun															
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis rapat yang terselenggara	1 tahun	6,242,393,599	1 tahun	2,756,596,137	1 laporan	1,100,000,000	1 laporan	510,055,398	1 laporan	718,017,126	1 laporan	718,017,126	1 laporan	3,474,613,283	20	56	SETWAN		
			372,500,000		2,159,800,000		198,750,000		-		60,861,300		60,861,300		2,220,661,300	10.0	115.0	SETWAN					
Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang diadakan	2 jenis	22,500,000	2 jenis	-	1 Paket	83,500,000	-	-	-	-	-	-	1 Paket	0	10	-	SETWAN					
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas jabatan			1 unit	1,990,800,000	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	1,990,800,000	-	-	SETWAN					
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional			6 unit	-	6 unit	-	-	-	-	-	-	-	6 unit	-	-	-	SETWAN					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan mesin yang diadakan	2 set, 1 set, 1 unit	100,000,000	2 set, 1 set, 1 unit	169,200,000	1 Paket	115,250,000	-	-	-	60,861,300	-	60,861,300	1 Paket	230,061,300	10	230	SETWAN					
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya perencanaan dan pengadaan gedung kantor			1 paket	-	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	SETWAN					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor	12 bulan	250,000,000	12 bulan	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-	-	-	SETWAN					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	-	Pengadaan Sarana dan	-	Pengadaan Sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN					

No	Sasaran	Usuan/Bidang Usuan Pemeliharaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome) Kegiatan (Output)	Target Rencana Pelembagaan Daerah Tahun 2026 (akhir periode rencana pelembagaan daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Pelembagaan Daerah Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Rencana Pelembagaan Daerah Tahun 2025 yang diwawansi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana yg diwawansi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana 2025 (akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Pelembagaan Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana 2025 (%)		Pewakafan Daerah Penanggung Jawab
				112 bulan	1500 Materai	112 bulan	1500 Materai	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	15	177.7			
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			764,646,000		883,687,454		1,073,176,277		161,060,833		461,751,145		461,751,145		1,345,438,599	15	177.7	SETWAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Gaji THL 8 org Jumlah laporan penggunaan perangk, materai dan benda pos	112 bulan 1500 Materai	193,000,000	112 bulan 1500 Materai	254,181,200	12 laporan	277,479,800	12 laporan	53,436,600	12 laporan	116,074,000	12 laporan	116,074,000	12 laporan	370,255,200	15	192	SETWAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan tagihan rek listrik, air, telepon serta TV befangganan	12 bulan	209,496,000	4 tagihan	240,004,564	12 laporan	275,000,000	12 laporan	57,670,936	12 laporan	117,446,225	12 laporan	117,446,225	12 laporan	357,450,789	15	171	SETWAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa yang dilayani Tenaga kebersihan	23 jenis 12 bulan	362,150,000	23 jenis	369,501,690	12 laporan	520,696,677	12 laporan	49,753,297	12 laporan	228,230,920	12 laporan	228,230,920	12 laporan	617,732,610	15	171	SETWAN
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMDA			1,433,159,800		1,657,255,969		2,784,643,199		87,228,879		453,062,665		453,062,665		2,110,318,634	13	99.0	SETWAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis mobil jabatan yang dipelihara	3 unit	498,796,000	3 unit	292,092,376	3 unit	1,004,224,020	3 unit	5,535,250	3 unit	73,020,500	3 unit	73,020,500	3 unit	365,112,876	15	73	SETWAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Gaji THL 7 org Jumlah jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara Jumlah jenis kendaraan dinas yang dibayarkan pajak	98 bulan 14 unit 14 unit	599,363,800	98 bulan 14 unit 14 unit	775,213,800	14 unit 14 unit	1,106,706,388	14 unit 14 unit	40,191,300	14 unit 14 unit	145,408,500	14 unit 14 unit	145,408,500	14 unit 14 unit	920,622,300	15	154	SETWAN
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang di pelihara	5 unit	20,000,000	5 unit	1,390,000	5 unit	35,000,000	-	-	-	-	-	-	5 unit	1,390,000	10	7	SETWAN
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	10 unit	65,000,000	10 unit	59,986,793	10 unit	65,000,000	10 unit	5,520,000	10 unit	24,810,000	10 unit	24,810,000	10 unit	84,796,793	10	130	SETWAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan rumah dinas yg di pelihara	1 unit	260,000,000	1 unit	528,573,000	2 unit	573,712,791	2 unit	35,982,329	2 unit	209,823,665	2 unit	209,823,665	2 unit	738,396,665	15	131	SETWAN
		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD			13,182,400,312		13,138,793,478		12,989,980,980		2,977,768,440		6,176,036,880		6,176,036,880		19,314,830,358	8.3	115.9	SETWAN
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terlaksananya pembayaran gaji pimpinan dan anggota DPRD	14 bulan	12,553,850,312	14 bulan	12,388,233,478	35 orang/b	12,337,480,980	35 orang/b	2,977,768,440	35 orang/b	6,176,036,880	35 orang/b	6,176,036,880	35 orang/b	18,564,270,358	15	148	SETWAN
		Penyediaan Pakai dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas yang di sedakan	4 jenis	541,050,000	4 jenis	688,700,000	4 paket	665,000,000	-	-	-	-	-	-	4 paket	688,700,000	10	127	SETWAN
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah jenis jaminan kesehatan yang di selenggarakan	1 paket	87,500,000	1 paket	63,860,000	35 orang	87,500,000	-	-	-	-	-	-	35 orang	63,860,000	0	73	SETWAN
		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD			758,404,720		899,393,120		675,000,000		100,382,846		188,917,688		188,917,688		1,088,310,808	15	147.7	SETWAN
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	jenis standar tunjangan perumahan pimpinan dan anggota	1 dok	50,000,000	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	-	-	SETWAN
		Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Gaji THL 1 org Jenis rapat AKD dan rapat paripurna yg di laksanakan	14 bulan 100 kali	468,404,720	14 bulan 100 kali	654,982,450	12 laporan	415,000,000	2 laporan	68,994,500	12 laporan	114,051,800	12 laporan	114,051,800	12 laporan	769,034,250	15	168	SETWAN
		Penyediaan Kebutuhan rumah Tangga DPRD	tersedianya kebutuhan rumah tangga	14 bulan	250,000,000	14 bulan	244,410,670	12 laporan	260,000,000	12 laporan	31,388,346	12 laporan	74,865,888	12 laporan	74,865,888	12 laporan	319,276,558	15	128	SETWAN
2	Meningkatkan fasilitas kedewanan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			24,995,265,838		21,971,649,085		11,023,619,000		2,665,019,896		4,592,026,919		4,592,026,919		26,563,676,004	14.6	95.3	
		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD			3,663,794,000		584,106,600		652,375,000		-		-		-		584,106,600	15	16	
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah perda yang dihasilkan	6 perda	3,663,794,000	6 perda	584,106,600	6 dokume	652,375,000	-	-	-	-	-	-	6 dokumen	584,106,600	15	16	SETWAN
		PEMBAHASAN KEBLUAKAN ANGGARAN			3,040,514,900		1,502,090,800		1,216,684,600		-		-		-		1,502,090,800	0	27.6	SETWAN
		Pembahasan KUA dan PPAS	terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	689,480,700	1 kali	715,906,200	1 dokume	348,722,900	1 dokum	-	1 dokume	-	1 dokume	-	1 dokumen	715,906,200	0	104	SETWAN
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	terlaksananya pembahasan KUA dan perubahan PPAS	1 kali	680,480,500	1 kali	21,719,100	1 dokume	348,722,900	1 dokum	-	1 dokume	-	1 dokume	-	1 dokumen	21,719,100	0	3	SETWAN
		Pembahasan APBD	terlaksananya pembahasan APBD	1 kali	465,788,950	1 kali	123,936,500	1 dokume	41,000,000	1 dokum	-	1 dokume	-	1 dokume	-	1 dokumen	123,936,500	0	27	SETWAN
		Pembahasan APBD Perubahan	terlaksananya pembahasan APBD perubahan	1 kali	465,788,850	1 kali	16,625,000	1 dokume	177,552,900	1 dokum	-	1 dokume	-	1 dokume	-	1 dokumen	16,625,000	0	4	SETWAN
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 perda	788,965,900	1 perda	623,904,000	1 dokume	304,685,900	1 dokum	-	1 dokume	-	1 dokume	-	1 dokumen	623,904,000	0	82	SETWAN
		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN			1,000,000,000		1,281,084,000		790,294,934		527,645,834		531,597,434		531,597,434		1,812,681,434	30	181.3	SETWAN
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah pengawasan penggunaan anggaran	3 kali	1,000,000,000	3 kali	1,281,084,000	3 dokume	790,294,934	3 dokum	527,645,834	3 dokume	531,597,434	3 dokume	531,597,434	3 dokumen	1,812,681,434	30	181	SETWAN
		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD			3,066,978,100		2,805,289,274		2,855,328,850		432,691,170		1,008,632,773		1,008,632,773		3,813,922,047	12.5	91.0	SETWAN
		Pendalaman tugas DPRD	Jumlah bimtek DPRD yang di laksanakan	6 kali	2,038,069,575	6 kali	1,718,353,850	6 dokume	1,769,943,250	6 dokum	342,421,990	6 dokume	786,496,422	6 dokume	786,496,422	6 dokumen	2,504,850,272	10	123	SETWAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome Kegiatan) (Output)	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2026 (akhir periode rencana perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yg dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah jenis informasi pemerintah yang di publikasikan	200 kali	675,924,925	200 kali	814,977,974	12 dokumen	770,835,600	12 dokumen	40,205,680	12 dokumen	95,830,151	12 dokumen	95,830,151	12 dokumen	910,808,125	15	87	SETWAN
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi 8 org	96 bulan	288,000,000	96 bulan	265,050,000	8 orang	290,550,000	8 orang	48,430,000	8 orang	120,430,000	8 orang	120,430,000	8 orang	385,480,000	15	134	SETWAN
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah hearing dengan masyarakat	20 kali	64,983,600	20 kali	6,907,450	1 dokume	15,000,000	1 dokum	1,633,500	1 dokume	5,876,200	1 dokume	5,876,200	1 dokumen	12,783,650	10	20	SETWAN
		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT			3,347,872,600		3,619,677,350		2,562,704,450		417,214,300		951,511,200		951,511,200		4,571,188,550	10	125,0	SETWAN
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang di adakan	1 tahun	1,455,314,800	1 tahun	2,439,825,350	1 laporan	905,000,000	1 laporan	399,747,900	1 laporan	574,887,150	1 laporan	574,887,150	1 laporan	3,014,712,500	15	207	SETWAN
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya penyusunan pikir DPRD	14 bulan	34,408,000	14 bulan	39,105,400	1 dokume	45,000,000	1 dokum	17,466,400	1 dokume	23,507,500	1 dokume	23,507,500	1 dokumen	62,612,900	15	87	SETWAN
		Pelaksanaan Reses	Terlaksananya RESES DPRD	3 kali	1,858,150,000	3 kali	1,140,746,600	3 dokume	1,612,704,450	-	-	-	353,116,550	-	353,116,550	3 dokumen	1,493,883,150	0	80	SETWAN
		FASILITASI TUGAS DPRD			10,876,106,238		12,179,401,061		2,946,231,166		1,287,468,592		2,100,285,512		2,100,285,512		14,279,686,573	20	131	SETWAN
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kurker, konsultasi pimpinan dan anggota DPRD	1 tahun	10,876,106,238	1 tahun	12,179,401,061	12 dokume	2,946,231,166	3 dokum	1,287,468,592	3 dokume	2,100,285,512	3 dokume	2,100,285,512	12 dokumen	14,279,686,573	20	131	SETWAN

BATUSANGKAR, Juli 2025

SEKRETARIS DPRD



Drs. YUHARDI

N.P. 19650909 199203 1 007



EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN III

Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Datar



Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar
Sumatera Barat



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan III Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Melalui Evaluasi Rencana Kerja Triwulan III Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya.

Program dan kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Akhirnya melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan III Tahun 2025 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih.

Batusangkar, Oktober 2025
Pit. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH DATAR


SYAIFUL, SH
NIP. 19780408 200501 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH	6
TRIWULAN III	
2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah	6
2.2 Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana	7
BAB III FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT	12
PENCAPAIAN KINERJA	
3.1. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	12
3.2. Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	12
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	14
4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar merupakan SKPD yang melaksanakan urusan penunjang, yaitu sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, sehingga dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatannya tidak secara langsung melibatkan masyarakat.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja ini merupakan bentuk untuk mengetahui sejauh mana Renstra telah dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Evaluasi dilaksanakan secara triwulan dan laporan ini merupakan *laporan triwulan III* pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga terjadi perubahan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya rancangan perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 adalah :

1. Menjadi acuan/dasar bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar.
2. Menyediakan dokumen resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam rangka penyusunan perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.
3. Agar seluruh aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen rancangan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan, serta
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

- 2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD Triwulan III
- 2.2 Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja (tambahkan tabel evaluasi renja)

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

- 3.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
- 3.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT

DAERAH TRIWULAN III

2.1 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEPALA OPD TRIWULAN III

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja Triwulan III	
			Target 2025	Realisasi
1.	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif	Zero Complain terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD	Zero Complain	
2.	Meningkatnya Layanan Administrasi	Nilai akuntabilitas Sekretariat DPRD	70	
		Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	
		Hasil Survey kepuasan masyarakat dan anggota DPRD	90	

2.2 REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN RENCANA KERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2025 memiliki anggaran sebesar Rp. 34.031.725.689 dan realisasinya sebesar Rp. 23.591.337.637 atau 69,32 %, lebih lanjutnya dapat dilihat dari uraian berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini terdiri atas 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.008.106.689,- dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 15.631.624.502,- atau 67,94% Pada pelaksanaan program ini, realisasi dari indikator kinerja keluaran (output) kegiatan masih rendah, diakibatkan oleh adanya perubahan sistem pembayaran dan pembaruan di aplikasi perpajakan. Dapat dilihat setiap sub kegiatan sebagai berikut :

A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% Keu	% Fisik
I.	<i>Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Rp. 183.207.500</i>	<i>Rp. 150.632.750</i>	<i>82,22</i>	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 171.407.500	Rp. 138.839.550	81	85
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 11.800.000	Rp. 11.793.200	99,94	100
II.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Rp. 2.998.348.733</i>	<i>Rp. 1.887.699.797</i>	<i>62,96</i>	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.986.548.733	Rp. 1.875.905.597	65	50
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 11.800.000	Rp. 11.794.200	100	100

III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 50.000.000	Rp. 13.500.000	27	
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Rp. 50.000.000	Rp. 13.500.000	27	0
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.995.000.000	Rp.1.677.754.005	84,1	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 25.000.000	Rp. 10.467.000	41,87	65
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 65.000.000	Rp. 27.057.000	41,63	65
3.	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Rp. 195.000.000	Rp. 155.849.550	79,92	82
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 195.000.000	Rp. 154.283.000	79,12	82
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 130.000.000	Rp. 79.830.000	61,41	65
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 285.000.000	Rp. 227.400.350	79,79	85
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.022.867.105	92,99	97
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 198.750.000	Rp. 133.055.700	66,95	
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 0	Rp. 0	0	
2.	Pengadaan Mebel	Rp. 83.500.000	Rp. 32.745.000	39,22	55
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 115.250.000	Rp. 100.310.700	87,04	94
4.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0	0	
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0	0	
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Rp. 0	Rp. 0	0	

	Bangunan Lainnya				
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.073.176.277	Rp. 461.751.145	43,1	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 277.479.600	Rp. 187.022.100	67,4	70
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 275.000.000	Rp. 189.117.251	68,77	70
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp. 60.000.000	Rp. 35.600.000	59,33	65
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 520.696.677	Rp. 350.296.211	67,27	70
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.784.643.199	Rp. 792.662.902	28,47	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 1.004.224.020	Rp. 97.011.550	9,66	65
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Operasional	Rp. 1.106.706.388	Rp. 263.091.200	23,77	65
3.	Pemeliharaan Mebel	Rp. 35.000.000	Rp. 0	0	55
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 65.000.000	Rp. 46.175.000	71,04	75
5.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 573.712.791	Rp. 386.385.152	67,35	70
VII.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp. 12.989.980.980	Rp. 9.785.417.730	75,33	
1.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp. 12.337.480.980	Rp. 9.236.429.230	74,86	80

2.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp. 565.000.000	Rp. 548.988.500	97,17	100
3.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp. 87.500.000	Rp. 0	0	30
IX.	Layanan Administrasi DPRD	Rp. 675.000.000	Rp. 428.866.056	63,54	
1.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp. 415.000.000	Rp. 308.289.700	74,29	80
2.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rp. 260.000.000	Rp. 120.576.356	46,38	65

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini terdiri atas 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 11.023.619.000,- dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 7.959.713.135,- atau 72,21%. Pada pelaksanaan program ini, realisasi dari indikator kinerja keluaran (output) kegiatan masih rendah, diakibatkan oleh perubahan sistem pembayaran dan pembaruan di aplikasi perpajakan. Dapat dilihat dari uraian sub kegiatan sebagai berikut :

B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% Keu	% Fisik
I.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp. 652.375.000	Rp. 506.299.913	77,61	
1.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 652.375.000	Rp. 506.299.913	77,61	85
II.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp. 1.216.684.600	Rp. 612.845.472	50,37	
1.	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp. 346.722.900	Rp. 145.575.132	41,99	100
2.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 346.722.900	Rp. 171.263.600	49,39	100
3.	Pembahasan APBD	Rp. 41.000.000	Rp. 0	0	0
4.	Pembahasan APBD Perubahan	Rp. 177.552.900	Rp. 136.676.700	76,98	100
5.	Pembahasan	Rp. 304.685.900	Rp. 159.330.040	52,29	0

	Pertanggungjawaban APBD				
III.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 790.294.934	Rp. 773.433.824	97,87	
1.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp. 790.294.934	Rp. 773.433.824	97,87	100
IV.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp. 2.855.328.850	Rp. 1.535.962.530	53,79	
1.	Pendalaman Tugas DPRD	Rp. 1.769.943.250	Rp. 1.063.411.899	60,08	65
2.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp. 779.835.600	Rp. 269.439.431	34,55	75
3.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp. 290.550.000	Rp. 193.330.000	66,54	70
4.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp. 15.000.000	Rp. 9.781.200	65,21	80
V.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp. 2.562.704.450	Rp. 1.597.451.250	62,33	
1.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp. 905.000.000	Rp. 853.976.100	94,36	95
2.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp. 45.000.000	Rp. 33.482.300	74,41	80
3.	Pelaksanaan Reses	Rp. 1.612.704.450	Rp. 709.992.850	44,02	65
VI.	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp. 2.946.231.166	Rp. 2.933.720.146	99,58	
1.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp. 2.946.231.166	Rp. 2.933.720.146	99,58	100

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

3.1 FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA

Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolak ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar yang di implementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threath*).

3.2 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian pelayanan, tentu masih dijumpai adanya kendala, tantangan ataupun hambatan. Terutama mengingat DPRD adalah unsur lembaga penyelenggara

pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan daerah tentu harus mempunyai banyak referensi dan informasi yang cukup luas. Untuk memperlancar serta mempermudah pengambilan keputusan diperlukan data dan informasi yang *up to date*, *valid* dan mudah untuk mengaksesnya setiap saat dibutuhkan. Maka tantangan pelayanan kedepan terhadap dukungan kelancaran terhadap fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan DPRD, harus disiapkan Sumber Daya Manusia yang memadai, mempunyai kompetensi dalam bidang informasi dan teknologi serta pengembangan fasilitas transformasi teknologi informasi.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Melalui evaluasi Rencana Kerja Triwulan III TA 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar, diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya. Program dan kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Pagu Sekretariat DPRD Tanah Datar pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 34.031.725.689,- sampai triwulan III ini anggaran sudah terealisasi sebesar Rp. 23.591.337.637,- atau 69,32%.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal yang penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang diemban oleh Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Sekretariat DPRD.

4.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala, oleh karena itu perlu diantisipasi sejak dini upaya-upaya perbaikan dan penyesuaiannya melalui evaluasi secara berkala setiap bulan secara intens dan konsisten dan berkoordinasi antar Bagian dan Sekretaris DPRD dan Pimpinan DPRD Kabupaten tanah Datar selaku pihak yang dilayani dan yang melayaninya.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada azas efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu berpedoman pada rencana yang sudah tersusun dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Akhirnya melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan III tahun 2025 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya

Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih.

Batusangkar, Oktober 2025
Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH DATAR



SYAIFUL, SH
NIP. 19780408 200501 1 004

No	Sasaran	Unsur/Bidang/Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcome/ Kegiatan (Output)	Target Rencor PerangkoTahun 2023 (Jumlah peroleh rencor perangko Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencor Perangko Daerah 2023 (Jumlah Perangko Daerah Tahun 2023)	Target Kinerja dan Anggaran Rencor Perangko Daerah Tahun 2023 (Jumlah Perangko yang direalisasi (Tahun 2023))	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	Realisasi Kinerja Pada Triwulan III	Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencor yg direalisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencor 2023 (Jumlah Tahun Pelaksanaan Rencor Perangko Daerah (%))	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencor 2023 (%)	Peringkat Daerah Perangko Jawab	KET												
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		764,646,000	883,687,454	1,073,176,277	161,046,833	461,731,145	726,453,562	726,453,562	726,453,562	1,610,123,016	15	212.6	SETIAW												
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Gaji THL 6 org Jumlah laporan penggunaan perangko, material dan benda pos	112 bulan 1500 paket	193,000,000	112 bulan 1500 Material	234,181,200	12 laporan	277,479,600	12 laporan	53,436,600	12 laporan	116,074,000	12 laporan	187,022,100	12 laporan	187,022,100	12 laporan	441,203,300	15	229	SETIAW					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan tagihan rek. listrik, air, telepon serta TV berlangganan	12 bulan	209,496,000	4 tagihan	240,004,364	12 laporan	275,000,000	12 laporan	57,870,936	12 laporan	117,446,225	12 laporan	189,117,251	12 laporan	189,117,251	12 laporan	189,117,251	12 laporan	429,121,815	15	205	SETIAW			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa yang dilayani Tenaga keberhasilan	23 jenis 12 bulan	362,150,000	23 jenis	389,501,690	12 laporan	320,696,677	12 laporan	49,733,297	12 laporan	228,230,920	12 laporan	350,296,211	12 laporan	350,296,211	12 laporan	350,296,211	12 laporan	739,797,901	15	204	SETIAW			
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PENDA		1,433,153,800	1,657,235,348	2,764,645,139	87,226,879	453,042,665	752,662,302	752,662,302	752,662,302	2,446,918,871	13	110.5	SETIAW												
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis mobil jabatan yang dipelihara	3 unit	498,796,000	3 unit	292,092,376	3 unit	1,004,234,020	3 unit	5,335,280	3 unit	73,020,300	3 unit	97,011,550	3 unit	97,011,550	3 unit	97,011,550	3 unit	389,103,926	15	76	SETIAW			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Gaji THL 7 org Jumlah jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara Jumlah jenis kendaraan dinas yang dibayarkan pajak	98 bulan 14 unit 14 unit	899,363,800	98 bulan 14 unit	775,213,800	14 unit	1,106,706,388	14 unit	40,191,300	14 unit	145,408,500	14 unit	263,091,200	14 unit	263,091,200	14 unit	263,091,200	14 unit	1,038,305,000	15	173	SETIAW			
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	20,000,000	5 unit	1,390,000	5 unit	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,390,000	10	7	SETIAW			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	10 unit	65,000,000	10 unit	99,995,793	10 unit	65,000,000	10 unit	5,320,000	10 unit	24,610,000	10 unit	46,175,000	10 unit	46,175,000	10 unit	46,175,000	10 unit	106,161,793	10	163	SETIAW			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan rumah dinas yg dipelihara	1 unit	250,000,000	1 unit	328,573,000	2 unit	573,712,791	2 unit	33,982,329	2 unit	209,823,665	2 unit	386,385,152	2 unit	386,385,152	2 unit	386,385,152	2 unit	914,958,152	15	131	SETIAW			
		LAYANAN KEVANGSIAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	15,182,400,312	15,182,400,312	15,182,400,312	12,989,360,380	2,877,766,440	6,176,006,680	9,765,417,730	9,765,417,730	9,765,417,730	22,304,211,208	6.3	157.9	SETIAW												
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tetapkannya pembayaran gaji pimpinan dan anggota DPRD	14 bulan	12,353,630,312	14 bulan	12,382,233,478	38 orang/b	12,337,430,950	35 orang	2,977,766,440	35 orang/b	6,176,006,680	38 orang/b	9,236,429,210	35 orang/b	9,236,429,210	35 orang/b	9,236,429,210	35 orang/b	21,624,662,708	15	172	SETIAW			
		Penyediaan Pakelan Dinas dan Alat/ut DPRD	Jumlah pakelan dinas yang disediakan	4 jenis	54,100,000	4 jenis	695,700,000	4 paket	365,000,000	-	-	-	-	-	548,988,500	-	548,988,500	-	548,988,500	-	1,235,683,500	10	228	SETIAW			
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah jenis jaminan kesehatan yang diselenggarakan	1 paket	87,500,000	1 paket	63,860,000	33 orang	87,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,860,000	0	73	SETIAW			
		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	756,404,720	756,404,720	893,535,120	675,000,000	100,582,648	186,917,665	428,666,056	428,666,056	428,666,056	1,328,258,176	15	178.1	SETIAW												
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jenis standar/undangan perumahan pimpinan dan anggota	1 dok	50,000,000	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	-	-	-	15	-	SETIAW
		Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Gaji THL 1 org Jenis rapat AKD dan rapat pmpuma yg dilaksanakan	14 bulan 100 kali	458,404,720	14 bulan 100 kali	634,982,450	12 laporan	415,000,000	12 laporan	68,994,500	12 laporan	114,051,800	12 laporan	308,289,700	12 laporan	308,289,700	12 laporan	308,289,700	12 laporan	963,272,130	15	210	SETIAW			
		Penyediaan Kebutuhan rumah Tangga DPRD	Kesediaan kebutuhan rumah tangga	14 bulan	250,000,000	14 bulan	244,410,670	12 laporan	280,000,000	12 laporan	31,388,346	12 laporan	74,365,688	12 laporan	120,576,356	12 laporan	120,576,356	12 laporan	120,576,356	12 laporan	364,987,026	15	146	SETIAW			
2	Meningkatkan kualitas pelayanan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		24,385,265,838	21,871,649,085	11,023,613,000	2,665,018,886	4,582,026,139	7,389,715,135	7,389,715,135	7,389,715,135	29,351,262,220	14.6	109.5	SETIAW												
		PENGEMBANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD		3,665,794,000	3,665,794,000	622,575,000	-	-	506,299,913	506,299,913	506,299,913	1,090,406,513	15	30	SETIAW												
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah perda yang dihasilkan	6 perda	3,663,794,000	6 perda	384,106,500	6 dokume	632,373,000	-	-	-	-	506,299,913	-	506,299,913	-	506,299,913	-	1,090,406,513	15	30	SETIAW				
		PEMBAHASAN KEBUAIKANGAN ANGGARAN		50,40,814,300	1,802,030,800	1,216,664,600	-	-	612,845,472	612,845,472	612,845,472	2,114,856,272	0	42.6	SETIAW												
		Pembahasan KUA dan PPAS	terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	699,480,700	1 kali	715,906,200	1 dokume	346,722,900	1 dokume	-	1 dokume	145,575,132	1 dokume	145,575,132	1 dokume	145,575,132	1 dokume	145,575,132	1 dokume	851,481,332	0	125	SETIAW			
		Pembahasan Perubahan KUA dan Pembahasan PPAS	terlaksananya pembahasan KUA dan pembahaan PPAS	1 kali	660,480,500	1 kali	21,719,100	1 dokume	346,722,900	1 dokume	-	1 dokume	171,263,600	1 dokume	171,263,600	1 dokume	171,263,600	1 dokume	171,263,600	1 dokume	192,982,700	0	28	SETIAW			
		Pembahasan APBD	terlaksananya pembahasan APBD	1 kali	453,783,930	1 kali	123,936,300	1 dokume	41,000,000	1 dokume	-	1 dokume	-	1 dokume	-	1 dokume	-	1 dokume	-	1 dokume	123,936,300	0	27	SETIAW			
		Pembahasan APBD Perubahan	terlaksananya pembahasan APBD perubahan	1 kali	453,798,830	1 kali	16,625,000	1 dokume	177,352,900	1 dokume	-	1 dokume	136,676,700	1 dokume	136,676,700	1 dokume	136,676,700	1 dokume	136,676,700	1 dokume	153,301,700	0	34	SETIAW			
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 perda	758,965,900	1 perda	623,904,000	1 dokume	304,683,900	1 dokume	-	1 dokume	159,330,040	1 dokume	159,330,040	1 dokume	159,330,040	1 dokume	159,330,040	1 dokume	783,234,040	0	103	SETIAW			
		PENGAWASAN PEMBELANGGARAN PEMERINTAHAN		1,000,000,000	1,281,064,000	790,234,934	527,645,834	531,597,454	775,453,824	775,453,824	775,453,824	2,054,517,824	30	205.5	SETIAW												
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah pengawasan penggunaan anggaran	3 kali	1,000,000,000	3 kali	1,281,064,000	3 dokume	790,234,934	3 dokume	527,645,834	3 dokume	531,597,454	3 dokume	773,433,824	3 dokume	773,433,824	3 dokume	773,433,824	3 dokume	2,034,517,824	30	205	SETIAW			
		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD		5,046,876,100	2,805,289,274	2,855,526,580	452,631,170	1,006,632,775	1,558,962,830	1,558,962,830	1,558,962,830	4,541,251,804	12.5	102.2	SETIAW												
		Pendanaan tugas DPRD	Jumlah biliket DPRD yang dilaksanakan	6 kali	2,038,069,575	6 kali	17,18,333,850	6 dokume	1,789,343,250	6 dokume	34,242,190	6 dokume	786,496,422	6 dokume	1,063,411,899	6 dokume	1,063,411,899	6 dokume	1,063,411,899	6 dokume	2,781,765,749	10	136	SETIAW			

No	Sasaran	Unsur/Bidang Unsur/Pemeliharaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcome/ Kegiatan/Output	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah alid Renja Perangkat Daerah Tahun Jalur 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang devulasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yg devulasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra alid Tahun 2026 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra alid Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah jenis informasi pemerintah yang di publikasikan	200 kali	675,924,925	200 kali	814,977,974	12 dokumen	779,835,600	12 dokumen	40,205,680	12 dokumen	95,830,151	12 dokumen	269,439,431	12 dokumen	269,439,431	12 dokumen	269,439,431	12 dokumen	1,084,417,405	15	87	SETWAN		
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli/fraksi 8 org	96 bulan	268,000,000	96 bulan	265,030,000	8 orang	290,350,000	8 orang	48,430,000	8 orang	120,430,000	8 orang	193,330,000	8 orang	193,330,000	8 orang	193,330,000	8 orang	458,380,000	15	199	SETWAN		
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah hearing dengan masyarakat	20 kali	64,963,600	20 kali	6,907,450	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	1,633,300	1 dokumen	5,676,200	1 dokumen	9,781,200	1 dokumen	9,781,200	1 dokumen	9,781,200	1 dokumen	16,688,690	10	26	SETWAN		
	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT			5,547,872,600		5,613,677,530		2,562,704,450		417,214,300		351,511,200		1,587,451,250		1,587,451,250		1,587,451,250		52,17,128,800	10	157.8	SETWAN		
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang di adakan	1 tahun	1,435,314,600	1 tahun	2,439,825,350	1 laporan	905,000,000	1 laporan	399,747,900	1 laporan	574,837,130	1 laporan	853,976,100	1 laporan	853,976,100	1 laporan	853,976,100	1 laporan	3,293,801,450	15	225	SETWAN		
	Penyusunan Pokok-Pokok Mhiran DPRD	Tetaksananya penyusunan pohn DPRD	14 bulan	34,408,000	14 bulan	39,105,400	1 dokumen	45,000,000	1 dokumen	17,466,400	1 dokumen	23,807,300	1 dokumen	33,482,300	1 dokumen	33,482,300	1 dokumen	33,482,300	1 dokumen	72,887,700	15	87	SETWAN		
	Pelaksanaan Reses	Tetaksananya RESES DPRD	3 kali	1,838,130,000	3 kali	1,140,746,600	3 dokumen	1,612,704,450	-	-	-	353,116,530	-	709,992,850	-	709,992,850	-	709,992,850	3 dokumen	1,830,739,450	0	100	SETWAN		
	FASILITASI TUGAS DPRD			10,876,106,238		12,179,401,061		2,346,251,166		1,287,468,592		2,100,285,512		2,933,720,146		2,933,720,146		2,933,720,146		15,113,121,207	20	159	SETWAN		
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kunler, konsultasi pmpnan dan anggota DPRD	1 tahun	10,876,106,238	1 tahun	12,179,401,061	12 dokumen	2,946,231,166	3 dokumen	1,287,468,592	3 dokumen	2,100,285,512	3 dokumen	2,933,720,146	3 dokumen	2,933,720,146	3 dokumen	2,933,720,146	12 dokumen	15,113,121,207	20	139	SETWAN		

Batusangkar, Oktober 2026
Ptt. Sekretaris DPRD


SYAIFUL, SH
NIP. 197804032005011004



EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN IV

Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Datar



Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar
Sumatera Barat



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Melalui Evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya.

Program dan kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Akhirnya melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV Tahun 2025 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih.

Batusangkar, Januari 2026
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH DATAR



HARFIAN FIKRI, S.Sos
NIP. 19680525 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH	6
 TRIWULAN III	
2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah	6
2.2 Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana	7
BAB III FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT	12
 PENCAPAIAN KINERJA	
3.1. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	12
3.2. Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	12
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	14
4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar merupakan SKPD yang melaksanakan urusan penunjang, yaitu sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, sehingga dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatannya tidak secara langsung melibatkan masyarakat.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja ini merupakan bentuk untuk mengetahui sejauh mana Renstra telah dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Evaluasi dilaksanakan secara triwulan dan laporan ini merupakan *laporan triwulan IV* pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga terjadi perubahan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya rancangan perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 adalah :

1. Menjadi acuan/dasar bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar.
2. Menyediakan dokumen resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam rangka penyusunan perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.
3. Agar seluruh aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen rancangan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan, serta
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

- 2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD Triwulan IV
- 2.2 Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja (tambahkan tabel evaluasi renja)

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

- 3.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja
- 3.2 Faktor Penghambat Keberhasilan Kerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV

2.1 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA OPD TRIWULAN IV

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja Triwulan IV	
			Target 2025	Realisasi
1.	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif	Zero Complain terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD	Zero Complain	Zero Complain
2.	Meningkatnya Layanan Administrasi	Nilai akuntabilitas Sekretariat DPRD	70	69,05
		Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1
		Hasil Survey kepuasan masyarakat dan anggota DPRD	95,50	96,66

2.2 REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN RENCANA KERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2025 memiliki anggaran sebesar Rp. 36.469.736.839 dan realisasinya sebesar Rp. 33.766.911.054 atau 91,43 %, lebih lanjutnya dapat dilihat dari uraian berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini terdiri atas 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.597.091.390,- dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 21.756.296.182,- atau 96,28% Pada pelaksanaan program ini, realisasi dari indikator kinerja keluaran (output) kegiatan masih rendah, diakibatkan oleh adanya perubahan sistem pembayaran dan pembaruan di aplikasi perpajakan. Dapat dilihat setiap sub kegiatan sebagai berikut :

A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% Keu	% Fisik
I.	Perencanaan, Pengarangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 232.707.500	Rp. 232.296.182	99,96	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	220.907.500	Rp. 220.831.750	99,97	100
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 11.800.000	Rp. 11.793.200	99,94	100
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.613.936.314	Rp. 2.418.011.714	92,5	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.602.136.314	Rp. 2.406.217.514	92,47	100
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 11.800.000	Rp. 11.794.200	99,95	100

III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 50.000.000	Rp. 13.500.000	27	
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Rp. 50.000.000	Rp. 13.500.000	27	50
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.298.929.000	Rp.2.195.869.500	84,1	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 35.429.000	Rp. 27.022.200	76,27	100
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 143.500.000	Rp. 103.134.500	71,87	100
3.	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Rp. 215.000.000	Rp. 204.784.550	95,25	100
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 215.000.000	Rp. 186.900.200	86,93	100
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 130.000.000	Rp. 119.310.000	91,78	100
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 360.000.000	Rp. 355.589.750	98,77	100
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.199.128.300	99,93	100
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.005.500.000	Rp. 944.939.703	93,98	
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 0	Rp. 0	0	
2.	Pengadaan Mebel	Rp. 130.250.000	Rp. 118.270.500	90,8	100
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 875.250.000	Rp. 826.6693203	94,45	100
4.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0	0	
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0	0	
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Rp. 0	Rp. 0	0	

	Bangunan Lainnya				
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.138.176.277	Rp. 1.090.255.277	95,79	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 277.479.600	Rp. 262.920.100	94,75	100
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 280.000.000	Rp. 259.879.580	92,81	100
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp. 60.000.000	Rp. 47.200.000	78,67	100
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 520.696.677	Rp. 520.255.599	99,92	100
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.633.643.199	Rp. 1.326.395.135	81,19	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 343.224.020	Rp. 180.962.050	52,72	100
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Operasional	Rp. 566.706.388	Rp. 445.656.500	78,64	100
3.	Pemeliharaan Mebel	Rp. 35.000.000	Rp. 28.943.100	82,69	100
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 85.000.000	Rp. 74.361.000	87,48	100
5.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 603.712.791	Rp. 596.472.485	98,8	100
VII.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp. 12.925.834.600	Rp. 12.845.392.740	86,58	
1.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp. 12.360.834.600	Rp. 12.296.404.240	99,48	100

2.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp. 565.000.000	Rp. 548.988.500	97,17	100
3.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp. 87.500.000	Rp. 0	0	100
IX.	Layanan Administrasi DPRD	Rp. 698.364.500	Rp. 689.307.361	98,7	
1.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp. 415.000.000	Rp. 412.520.300	99,4	100
2.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rp. 283.364.500	Rp. 276.787.061	97,68	100

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini terdiri atas 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 13.872.645.449,- dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 12.010.614.872,- atau 86,58%. Pada pelaksanaan program ini, realisasi dari indikator kinerja keluaran (output) kegiatan masih rendah, diakibatkan oleh perubahan sistem pembayaran dan pembaruan di aplikasi perpajakan. Dapat dilihat dari uraian sub kegiatan sebagai berikut :

B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% Keu	% Fisik
I.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp. 1.277.156.500	Rp. 1.127.616.716	88,29	
1.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 1.277.156.500	Rp. 1.127.616.716	88,29	100
II.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp. 1.423.724.740	Rp. 1.084.806.022	76,19	
1.	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp. 346.722.900	Rp. 145.575.132	41,99	100
2.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 173.093.000	Rp. 171.263.600	98,94	100
3.	Pembahasan APBD	Rp. 564.886.000	Rp. 467.406.550	82,74	100
4.	Pembahasan APBD Perubahan	Rp. 177.552.900	Rp. 141.230.700	79,54	100
5.	Pembahasan Pertanggungjawaban	Rp. 161.0469.940	Rp. 159.330.040	98,67	100

	APBD				
III.	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<i>Rp. 774.495.424</i>	<i>Rp. 773.433.824</i>	<i>99,86</i>	
1.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp. 774.495.424	Rp. 773.433.824	99,86	100
IV.	<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	<i>Rp. 3.624.543.850</i>	<i>Rp. 2.651.552.843</i>		
1.	Pendalaman Tugas DPRD	Rp. 2.539.158.250	Rp. 1.780.750.736	70,13	100
2.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp. 779.550.000	Rp. 576.953.407	72,83	100
3.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp. 290.550.000	Rp. 290.125.000	99,85	100
4.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp. 15.000.000	Rp. 12.723.700	84,82	100
V.	<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	<i>Rp. 2.409.029.450</i>	<i>Rp. 2.091.027.555</i>	<i>86,8</i>	
1.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp. 935.000.000	Rp. 907.196.600	97,03	100
2.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp. 45.000.000	Rp. 43.023.400	95,61	100
3.	Pelaksanaan Reses	Rp. 1.429.029.450	Rp. 1.140.807.555	79,83	100
VI.	<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>	<i>Rp. 4.363.695.485</i>	<i>Rp. 4.282.177.912</i>	<i>98,13</i>	
1.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp. 4.363.695.485	Rp. 4.282.177.912	98,13	100

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

3.1 FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA

Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolak ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar yang di implementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threath*).

3.2 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian pelayanan, tentu masih dijumpai adanya kendala, tantangan ataupun hambatan. Terutama mengingat DPRD adalah unsur lembaga penyelenggara pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan daerah tentu harus mempunyai banyak referensi dan informasi yang cukup luas. Untuk memperlancar serta mempermudah

pengambilan keputusan diperlukan data dan informasi yang *up to date*, *valid* dan mudah untuk mengaksesnya setiap saat dibutuhkan. Maka tantangan pelayanan kedepan terhadap dukungan kelancaran terhadap fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan DPRD, harus disiapkan Sumber Daya Manusia yang memadai, mempunyai kompetensi dalam bidang informasi dan teknologi serta pengembangan fasilitas transformasi teknologi informasi.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Melalui evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV TA 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar, diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya. Program dan kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Pagu Sekretariat DPRD Tanah Datar pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 36.469.736.839,- sampai triwulan IV ini anggaran sudah terealisasi sebesar Rp. 33.766.911.054,- atau 91,43 %.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal yang penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang diemban oleh Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Sekretariat DPRD.

4.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala, oleh karena itu perlu diantisipasi sejak dini upaya-upaya perbaikan dan penyesuaiannya melalui evaluasi secara berkala setiap bulan secara intens dan konsisten dan berkoordinasi antar Bagian dan Sekretaris DPRD dan Pimpinan DPRD Kabupaten tanah Datar selaku pihak yang dilayani dan yang melayaninya.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada azas efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu berpedoman pada rencana yang sudah tersusun dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Akhirnya melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan III tahun 2025 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya

Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih.

Batusangkar, Januari 2026
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH DATAR



HARFIAN FIKRI, S.Sos
NIP. 19680525 198809 1 001

EVALUASI HASIL PEJAKSAMAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
TRIKUJAN IV
TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcome/Kegiatan/Du/Pu/ut	Target Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 (akhir periode rencana perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Beresita Perangkat Daerah Tahun Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi I Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi II Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi III Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi IV Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana 2023 (akhir periode)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana dan Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana dan Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET						
				%	Rp	K	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	K	Rp	Phi (%)	Kou (%)								
1	Meningkatkan layanan administrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	37,45	1.206,712	47,006	428,204	56,469	756,653	7,565	161,762	14,586	363,021	23,591	337,637	33,766	311,054	33,766	311,054	33,064	182,063	167,4	338,5							
					112,885,509	138,113,309	232,707,509	27,841,209	78,021,509	159,832,759	232,834,759	232,824,759	388,738,059	100	217,3	SETWAN															
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi di Kota SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang di hasilkan	100%	16,994,400	3 dok	6,819,000	100%	11,800,000	83,19	9,815,600	99,94	11,753,200	99,94	11,753,200	99,94	11,793,200	99,94	11,793,200	3 dok	18,612,200	100	110	SETWAN				
					ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan yang di hasilkan	100%	2,562,880,800	2,671,573,043	2,615,396,314	727,241,422	1,403,462,146	1,667,668,797	2,416,011,714	2,416,011,714	5,068,630,758	100	151,3	SETWAN												
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yg disediakan	100%	2,544,830,500	14 bulan	2,654,760,043	100%	2,602,136,314	24,03	717,832,822	46,8	1,397,997,946	62,81	1,675,905,997	92,47	2,406,217,514	92,47	2,406,217,514	20 orang/bulan	5,070,977,359	100	199	SETWAN				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ALN Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang di hasilkan	100%	18,000,000	1 dok	6,819,000	100%	11,800,000	82,7	9,753,600	99,95	11,794,200	99,95	11,794,200	99,95	11,794,200	99,95	11,794,200	1 Laporan	18,613,200	100	103	SETWAN				
					ADMINISTRASI KEPEKERJAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah paket perlatan rumah tangga	100%	209,000,000	40,000,000	50,000,000	-	-	-	13,800,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000	27	13,800,000	27	13,800,000	20 orang	33,300,000	50	26	SETWAN
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	100%	209,000,000	1 tahun	40,000,000	100%	50,000,000	-	-	-	27	13,800,000	27	13,800,000	27	13,800,000	27	13,800,000	27	13,800,000	20 orang	33,300,000	50	26	SETWAN	
					ADMINISTRASI LAIN PERANGKAT DAERAH	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	100%	6,355,871,074	3,414,256,757	2,236,328,000	616,126,246	354,146,776	1,677,754,005	2,186,886,500	2,186,886,500	5,610,126,257	100,0	258,8	SETWAN												
					Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket perlatan rumah tangga	100%	25,995,400	23 jenis	25,000,000	100%	35,425,000	34,87	8,217,000	41,87	10,467,000	41,87	10,467,000	76,27	27,022,200	76,27	27,022,200	25 paket	32,022,200	100	200	SETWAN				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	100%	30,992,400	30 jenis	66,489,740	100%	143,300,000	-	40,7	26,457,000	41,63	27,037,000	71,67	103,134,300	71,67	103,134,300	30 paket	169,624,240	100	347	SETWAN					
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan barang cetakan dan pengadaan	100%	107,000,000	15 jenis	94,304,000	100%	218,000,000	11,12	21,679,000	22,96	44,775,000	79,92	183,889,350	95,25	204,784,350	95,25	204,784,350	30 paket	299,238,350	100	230	SETWAN				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket bahan barang cetakan dan pengadaan	100%	149,999,775	20 jenis	129,388,000	100%	218,000,000	6,66	12,965,000	13,44	26,205,000	79,12	154,233,000	83,93	186,900,200	83,93	186,900,200	20 paket	316,238,200	100	211	SETWAN				
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan yang di sediakan	100%	130,000,000	10 media	124,200,000	100%	130,000,000	13,12	19,690,000	31,04	40,330,000	61,41	79,630,000	91,78	119,100,000	91,78	119,310,000	8 dokumen	24,310,000	100	187	SETWAN				
					Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis tamu yang dirawat selama 1 tahun	100%	269,383,900	1 tahun	218,078,830	100%	360,000,000	31,80	43,039,830	30,83	87,875,680	79,79	227,400,330	98,77	353,393,750	98,77	353,393,750	1 laporan	373,668,630	100	213	SETWAN				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis rapat yang diselenggarakan	100%	6,242,393,399	1 tahun	2,756,996,137	100%	1,200,000,000	34,06	510,036,396	65,27	716,017,126	92,99	1,022,697,103	99,93	1,199,126,300	99,93	1,199,126,300	1 laporan	3,935,724,437	100	63	SETWAN				
					PENYEDIAAN BARANG MELUK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMUDA	Jumlah paket perlatan dan mesin yang di sediakan	100%	372,500,000	2,158,200,000	1,005,500,000	1,005,500,000	-	60,661,200	153,636,700	344,339,703	344,339,703	2,886,463,203	100,0	467,3	SETWAN											
					Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang di sediakan	100%	22,500,000	2 jenis	-	100%	130,230,000	-	-	-	39,22	32,745,000	90,8	118,270,300	90,8	118,270,300	21 unit	0	100	-	SETWAN					
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terdapatnya kendaraan dinas jabatan	1 unit	1,990,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,990,600,000	-	-	-	SETWAN			
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terdapatnya kendaraan dinas operasional	6 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket perlatan dan mesin yang di sediakan	100%	100,000,000	2 set, 1 set, 1 set	169,200,000	100%	875,290,000	-	32,81	60,861,300	87,04	100,310,700	94,45	826,669,203	94,45	826,669,203	157 unit	905,969,203	100	996	SETWAN					
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertaksatnya perencanaan dan pengadaan gedung kantor	1 paket	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor	100%	230,000,000	12 bulan	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	100%	-	Pengadaan Sarana	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN								
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				809,646,000	319,887,454	1,158,176,277	165,460,833	478,351,145	762,635,562	1,080,255,279	1,080,255,279	2,006,642,753	100	232,6	SETWAN																
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penggunaan barang ke, jasa dan benda pos lainnya selama 1 tahun	100%	193,000,000	112 bulan 1900 Material	254,181,200	100%	277,479,500	19,26	63,436,600	41,63	116,074,000	67,4	167,022,100	94,75	262,320,100	94,75	262,320,100	1 laporan	517,101,300	100	266	SETWAN									
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Manusia dan Listrik	Jumlah laporan tagihan rek. listrik, air, telepon serta TV berlangganan	100%	209,496,000	4 tagihan	240,004,564	100%	230,000,000	21,04	57,670,936	42,71	117,445,225	63,77	189,117,251	92,81	259,879,630	92,81	259,879,630	3 laporan	499,834,144	100	239	SETWAN									
Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah paket jasa perlatan dan peningkatan kantor	100%	45,000,000	4 jenis	35,900,000	100%	60,000,000	4,00	2,400,000	27,67	16,600,000	59,33	38,600,000	78,67	47,200,000	78,67	47,200,000	4 laporan	83,100,000	100	185	SETWAN									
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa yang dilayani	100%	362,150,000	23 jenis	389,501,650	100%	520,696,677	9,96	49,730,297	43,63	238,230,920	67,27	330,296,211	99,92	320,235,999	99,92	320,235,999	21 laporan	909,757,289	100	251	SETWAN									

No	Sasaran	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcome/Kegiatan/DuPak	Tanggal Rencana Peringkat Daerah Tahun 2025 (akhir periode rencana peringkat Daerah)	Rencana Capaian Kinerja Rencana Peringkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Tingkat Kinerja dan Anggaran Rencana Peringkat Daerah Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)	Realisasi Kinerja Pada Tahunan I	Realisasi Kinerja Pada Tahunan II	Realisasi Kinerja Pada Tahunan III	Realisasi Kinerja Pada Tahunan IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Peringkat Daerah	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Peringkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja (dari Realisasi Anggaran Rencana Peringkat Tahun 2025 (%))	Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	KET										
2	Meningkatkan kualitas pelayanan	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DEWAS		1,833,158,800	1,637,253,969	1,635,645,193	67,228,673	453,062,665	792,662,902	1,326,335,153	1,326,335,153	2,965,651,104	100	157.6	SETWAN										
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bayu Pemeliharaan dan Pakai Kelembagaan Perengangan Dinas atau Kelembagaan Dinas Jabatan	Jumlah jenis mobil/jabatan yang dipelihara	100%	498,795,000	3 unit	29,202,376	100%	341,226,020	0.83	5,331,250	7,27	70,020,900	9.96	97,011,850	52,72	180,962,080	52,72	180,962,080	3 unit	47,034,426	100	95	SETWAN	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bayu Pemeliharaan, Pakai dan Pelembagaan Kelembagaan Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kelembagaan dinas operasional yang dipelihara dari dibayar an pakai serta pembayaran gaji tenaga harian lepas	100%	909,963,300	14 unit	775,213,800	100%	966,706,388	3.63	46,191,300	13,14	145,408,900	23,77	263,041,200	78,84	44,539,500	78,84	44,539,500	20 unit	1,220,870,300	100	204	SETWAN	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang di perelihara	100%	20,900,000	3 unit	1,390,000	100%	30,000,000	-	-	-	-	62,99	23,943,100	62,99	25,943,100	3 unit	30,333,100	100	132	SETWAN			
		Pemeliharaan Perawatan Mesin Lainnya	Jumlah jenis dan cara pengalangan yang di perlihaa	100%	65,000,000	10 unit	59,986,793	100%	85,000,000	6.49	5,320,000	38,17	24,810,000	71,04	46,175,000	87.48	74,361,000	87.48	74,361,000	10 unit	134,347,793	100	207	SETWAN	
		Pemeliharaan Pemeliharaan Sains dan Prakeras Gedung Kantor atau Ruang Lain Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan rumah dinas yg di perlihaa	100%	290,000,000	1 unit	328,373,000	100%	604,712,791	6,27	33,982,329	36,87	209,823,693	67,38	395,383,152	96.8	996,72,485	96.8	996,72,485	2 unit	1,125,04,585	100	131	SETWAN	
		KESEHATAN TERDAFTAR DPRD	13,182,800,312	13,138,793,476	12,923,854,600	2,977,768,440	6,176,036,880	3,765,417,730	12,845,332,740	12,845,332,740	25,384,186,216	66.7	166.0	SETWAN											
		Pemeliharaan Administrasi Keuangan DPRD	Terbaksanya penyiangan	100%	12,833,850,312	1 unit	12,388,233,478	100%	12,360,834,600	24,14	2,977,768,440	90,06	6,176,036,880	74,96	5,236,429,230	99.48	12,296,04,240	99.48	12,296,04,240	35 orang	24,696,637,718	100	197	SETWAN	
		Pelayanan Pakan Dinas dan KHRU DPRD	Jumlah pakan dinas yang di sediakan	100%	841,950,000	4 unit	696,700,000	100%	568,000,000	-	-	-	97,17	549,983,900	97,17	549,983,900	4 paket	12,356,693,500	100	228	SETWAN				
		Pelaksanaan Medial Check Up DPRD	Jumlah jenis dan jumlah kesehatan yang di selenggarakan	100%	87,900,000	1 paket	83,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 orang	63,890,000	0	73	SETWAN
		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	790,404,720	630,293,120	604,064,200	100,360,546	100,317,600	428,060,06	603,407,261	603,407,261	603,407,261	603,407,261	603,407,261	1,066,700,461	100	220.7	SETWAN								
		Pemeliharaan Administrasi Keanggotaan DPRD	jenis standar pelayanan pemeliharaan pimpinan dan anggota DPRD	100%	30,000,000	1 dok	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
		Facilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	jenis rapat AMD dan rapat pempung di pelaksanaan	100%	438,404,720	14 bulan	64,922,450	100%	415,000,000	16,63	68,994,300	27.48	114,051,800	74,29	308,289,700	96.4	412,520,300	99.4	412,520,300	11 laporan	1,067,502,790	100	233	SETWAN	
		Penyediaan kebutuhan rumah Tangga DPRD	tersedianya kebutuhan rumah tang	100%	290,000,000	14 bulan	24,410,670	100%	281,364,300	12,07	31,398,346	28,79	74,963,888	46,38	120,576,356	97.88	276,787,061	97.88	276,787,061	11 laporan	821,197,731	100	208	SETWAN	
		PROGRAM DURUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	24,804,626,498	21,679,880,005	19,675,644,444	2,884,016,000	4,682,028,519	7,050,710,156	12,016,314,872	12,016,314,872	12,016,314,872	12,016,314,872	12,016,314,872	59,082,890,467	66.7	122.4	SETWAN								
		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	3,865,784,000	384,106,600	1,277,136,800	-	-	506,288,013	1,127,616,716	1,127,616,716	1,127,616,716	1,127,616,716	1,127,616,716	1,711,723,316	100	47	SETWAN								
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah perundang di hasilikan	100%	3,863,794,000	6 judul	384,106,600	100%	1,277,136,800	-	-	-	77.81	506,299,913	88.29	1,127,616,716	88.29	1,127,616,716	1 dokumen	1,711,723,316	100	47	SETWAN		
		PEMBAHASAN KEBAKARAN ANGGARAN	5,040,514,900	1,502,060,800	1,423,724,746	-	-	612,845,472	1,684,806,622	1,684,806,622	1,684,806,622	1,684,806,622	1,684,806,622	2,586,656,622	90	63.3	SETWAN								
		Pembahasan KUA dan PPS	tidak adanya pembahasan KUA dan PPS	100%	699,480,700	1 kali	715,906,200	100%	346,722,900	-	-	-	41.99	145,573,132	41.99	145,573,132	41.99	145,573,132	1 dokumen	85,1481,332	100	125	SETWAN		
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPS	tidak adanya pembahasan KUA dan perubahan PPS	100%	690,480,800	1 kali	21,719,100	100%	173,091,000	-	-	-	49.39	171,263,600	98.84	171,263,600	98.84	171,263,600	1 dokumen	19,292,700	100	28	SETWAN		
		Pembahasan APBD	tidak adanya pembahasan APBD	100%	435,783,950	1 kali	123,536,500	100%	594,896,000	-	-	-	82.74	467,406,550	82.74	467,406,550	82.74	467,406,550	1 dokumen	99,1343,030	100	130	SETWAN		
		Pembahasan APBD Perubahan	tidak adanya pembahasan APBD perubahan	100%	436,798,850	1 kali	16,628,000	100%	177,882,900	-	-	-	76.98	136,676,700	79.84	141,230,700	79.84	141,230,700	1 dokumen	19,788,700	100	36	SETWAN		
		Pembahasan perantangan APBD	tidak adanya pembahasan perantangan APBD	100%	739,963,900	1 judul	62,304,000	100%	161,469,940	-	-	-	32.29	139,300,040	95.87	139,300,040	95.87	139,300,040	1 dokumen	76,324,040	100	103	SETWAN		
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	1,000,000,000	1,281,664,000	774,483,424	827,648,634	551,887,434	775,453,824	775,453,824	775,453,824	775,453,824	775,453,824	775,453,824	2,034,517,824	100	205.5	SETWAN										
Pengawasan Pengunaan Anggaran	Jumlah pengawasan penggunaan anggaran	100%	1,000,000,000	3 kali	1,281,084,000	100%	774,493,424	44.6	827,648,634	67.27	531,9974,34	97.87	773,433,824	99.86	773,433,824	1 dokumen	2,034,517,824	100	205	SETWAN					
PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	5,066,376,100	2,805,283,274	5,624,684,856	453,681,170	100,652,722	1,83,942,330	2,851,382,648	2,851,382,648	2,851,382,648	2,851,382,648	2,851,382,648	4,546,642,117	100	120.5	SETWAN										
Pembinaan dan tugas DPRD	Jumlah Monev DPRD yang di lakukan	100%	2,338,969,973	6 kali	1,718,383,830	100%	2,539,186,230	18,68	342,421,990	44.44	786,496,422	60,08	1,063,411,899	70,13	1,780,730,736	70,13	1,780,730,736	6 dokumen	3,496,104,936	100	172	SETWAN			
Publisasi dan Dokumentasi Bekerja	Jumlah jenis informasi pemerintah yang di publikasikan	100%	679,924,929	200 kali	814,977,974	100%	779,837,800	5,16	40,205,680	12,29	98,830,151	34.38	299,439,631	72,63	867,933,407	72,63	867,933,407	1 dokumen	1,382,931,381	100	87	SETWAN			
Penyediaan Tenaga Ahli Faksi	Jumlah tenaga ahli faksi 8 org	100%	282,000,000	96 bulan	285,050,000	100%	290,890,000	16,67	48,430,000	41,45	120,430,000	96.54	193,330,000	99.85	290,125,000	99.85	290,125,000	8 orang	855,179,000	100	193	SETWAN			
Penyenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah kegiatan dengan masyarakat	100%	64,983,600	20 kali	6,907,450	100%	15,000,000	10.89	1,631,900	39,17	5,676,200	69,21	9,781,200	84.82	12,723,700	84.82	12,723,700	1 dokumen	19,631,130	100	30	SETWAN			
PENYERAPAN DAN PENCAMPURAN APBD DAN PADAKAT	5,547,872,200	5,419,477,350	2,466,026,460	417,214,500	861,611,200	1,897,461,290	2,881,627,666	2,881,627,666	2,881,627,666	2,881,627,666	2,881,627,666	6,710,704,066	100	146.7	SETWAN										
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang di lakukan	100%	1,433,214,800	1 tahun	2,439,629,390	100%	933,000,000	21,21	399,747,900	63,82	374,897,130	94.39	853,599,100	97,03	907,190,800	11 laporan	3,447,021,180	100	230	SETWAN					
Penyusunan Fotok Polok PIR dan DPRD	Jumlah kegiatan yang di lakukan	100%	34,408,000	14 bulan	39,105,400	100%	45,000,000	38.81	17,695,400	52,24	23,807,900	74.41	33,482,300	95.81	43,023,400	95.81	43,023,400	1 dokumen	82,128,800	100	87	SETWAN			
Pelaksanaan Reses	Terbaksanya RESES DPRD	100%	1,838,150,000	3 kali	1,140,746,600	100%	1,429,028,490	-	-	-	21.9	333,116,890	44.02	709,992,890	79.83	1,140,807,893	79.83	1,140,807,893	3 dokumen	2,281,354,189	100	123	SETWAN		
FASILITASI TUGAS DPRD	10,676,104,258	12,179,401,061	8,949,681,465	1,267,466,582	210,283,512	2,853,720,146	4,282,177,312	4,282,177,312	4,282,177,312	4,282,177,312	4,282,177,312	16,461,576,375	100	151	SETWAN										
Koodinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kunter, konsultasi pemnran dan anggota DPRD	100%	10,876,106,238	1 tahun	12,179,401,061	100%	4,363,936,485	21,11	1,287,466,592	71,29	210,283,512	99.86	2,853,720,146	98.13	4,282,177,312	98.13	4,282,177,312	1 dokumen	16,461,578,973	100	151	SETWAN			